ABSTRAK

EVALUASI TERHADAP TATA CARA REKRUTMEN CPNS DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh
RIZKY ALAMSYAH

Proses pelaksanaan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia seringkali menjadi sorotan di masyarakat, permasalahan pro-kontra yang terjadi di masyarakat disebabkan lemahnya mekanisme penyelenggaran rekrutmen sehingga menyebabkan munculnya ketidakpuasan di masyarakat. Permasalahan yang terjadi adalah belum terjaringnya pelamar CPNS yang memiliki kualitas sesuai dengan keinginan pemerintah daerah. Faktor penyebabnya adalah substansi seleksi/ujian CPNS tidak mampu mengukur kompetensi yang dimiliki oleh pelamar CPNS selain itu pula aspek daya nalar, daya analitis, kepribadian, kemampuan penggunaan bahasa Indonesia dan Asing serta penggunaan Teknologi Informasi belum mampu untuk diukur melalui tes yang sekarang dilaksanakan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan tata cara rekrutmen CPNS di Kota Bandar Lampung? dan bagaimana tata cara rekrutmen CPNS yang tepat di Kota Bandar Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan metode untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman berdasarkan realita yang ada yaitu tentang evaluasi tata cara rekrutmen Pegawai Negeri Sipil di Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2003 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2004 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dua pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, sebagai berikut: Pelaksanaan tata cara rekrutmen CPNS di yang ada Kota Bandar Lampung belum optimal atau selektif dalam rekruitmen aparatur khususnya CPNS pada Kota Bandar LampungTata cara rekrutmen CPNS yang tepat di Kota Bandar Lampung belum sesuai dengan pelaksanaan PP No.48 Tahun 2005 Jo PP No. 43 Tahun 2007 yaitu motivasi, tekanan/intervensi, peran kelembagaan dan pengawasan. Dalam hal pelaksanaan rekruitmen CPNS, masih sering terjadi tekanan-tekanan ataupun intervensi dari berbagai pihak terhada pihak penyelenggara (BKD) untuk mempengaruhi pelaksanaan rekruitmen tersebut.